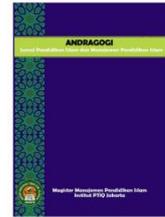


Article Type : Research Article
Date Received : 13.08.2020
Date Accepted : 18.08.2020
Date Published : 25.09.2020
DOI : doi.org/10.36671/andragogi.vii3.66



MELACAK SIGNIFIKANSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL ISLAM DI INDONESIA

Abd Aziz

STIT Al-Amin Kreo Tangerang, Indonesia (azizindinisi@stitalamin.ac.id)

Kata Kunci :

Pendidikan Islam,
Multikulturalisme
Indonesia

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi literatur terkait pendidikan multikultural Islam di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber yang dapat digunakan terkait dengan permasalahan pendidikan multikultural Islam di Indonesia. Dalam penelusuran beberapa literatur menggunakan mesin cari atau mungkin lebih mudahnya adalah pengindeks jenis apa saja dokumen. Misalnya kita gunakan *Google Scholar* dengan kueri mengandung anak kalimat *Social Network*, tentunya akan dihasilkan jumlah anak kalimat dengan daftar dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan apapun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga, manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional. Karena itu untuk mengatasi problem kemanusiaan yang ada, tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan yang multidimensional. Dan, di dalamnya adalah pendidikan multikultural. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Mengingat kenyataan seperti ini, menjadi penting untuk mengembangkan pendidikan multikultural, yakni sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Dalam hal pendidikan multikultural, sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultur, sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultur para siswanya.

Key Words :

Islamic Education,
Indonesian

Abstracts

This research is a literature study related to Islamic multicultural education in Indonesia. Data collection was carried out through various

sources that can be used in relation to the problems of Islamic multicultural education in Indonesia. In searching some literature using a search engine or maybe it is easier to index any type of document. For example, we use Google Scholar with a query containing Social Network clauses, of course the number of clauses will be generated with a list of related documents. The results show that education, whatever its form, must not lose its multicultural dimension, including religious and scientific education, because of the realities in life is essentially multidimensional. Likewise, humans themselves are essentially multidimensional creatures. Therefore, to overcome the existing humanitarian problems, there is no other way than to use a multidimensional approach. And, in it is multicultural education. Indonesia is a country that has ethnic diversity but has the same goal, namely towards a just, prosperous and prosperous society. Given this reality, it is important to develop multicultural education, which is an educational process that provides equal opportunities to all children of the nation regardless of treatment due to differences in ethnicity, culture and religion, which gives respect to diversity, and which gives equal rights to ethnic groups. minorities, in an effort to strengthen unity and integrity, national identity and the image of the nation in the eyes of the international community. In the case of multicultural education, schools must design the learning process, prepare curriculum and evaluation designs, and prepare teachers who have multicultural perceptions, attitudes and behaviors, so that they become parts that make a positive contribution to the development of multicultural attitudes of their students.

A. PENDAHULUAN

Nalar ideologis Islam tentang penciptaan manusia berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal dan menghormati berbagai budaya, ras, dan agama sebagai suatu realitas kemanusiaan.¹ Namun demikian, faktanya manusia seringkali tidak dapat menahan diri untuk tidak tersulut “api” konflik yang bersumber dari perbedaan suku, ras dan agama. Karenanya, disparitas antara alam idealisme dan kenyataan tersebut perlu dijumpai dengan memberikan pemahaman multikultural dalam proses pendidikan keislaman.

Pendidikan multikultural sebagai konsep mempunyai relevansi dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Prinsip pendidikan multikultural seiring dengan “adagium sakral” bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” yang merefleksikan kesadaran bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda namun terikat dalam kesatuan Indonesia.² Keberbedaan dan keragaman yang dikonotasikan secara negatif berpotensi menambah daftar

¹ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

² Saihu Saihu, “PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURALISME,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2018): 170–87; Saihu et al., “Design of Islamic Education Based on Local Wisdom (An Analysis of Social Learning Theories in Forming Character through Ngejot Tradition in Bali),” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 06 SE-Articles (April 26, 2020): 1278–93, <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/11802>.

panjang munculnya konflik yang mengancam integrasi bangsa. Karenanya, dibutuhkan pendekatan multidimensional dengan mengacu pada diskursus pendidikan multikulturalisme sebagai pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan dan budaya masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.³

Islam sebagai agama *rahmat li al-alamin* mengakui dan mengajarkan paham pluralitas keagamaan.⁴ Ada keyakinan yang berkembang dalam umat Islam bahwa keragaman agama adalah hal yang niscaya dalam kehidupan dunia ini, namun agama yang paling benar adalah Islam,⁵ dan tidak hak seseorang untuk memaksa orang lain untuk menganut suatu agama.⁶ Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.⁷

Pernyataan di atas, memperlihatkan wajah Islam sebagai agama yang inklusif atau terbuka. Islam bukan agama tertutup dan menolak eksklusivisme, absolutisme dengan memberikan ruang yang representatif terhadap pluralisme. Hal inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik dalam pendidikan agama Islam agar bisa melahirkan sikap inklusif sekaligus toleransi positif di kalangan umat beragama, sejalan dengan semangat al- Qur'an agar fenomena lahiriah tidak menghalangi usaha untuk menuju titik temu (*kalimah sawâ'*) antara semuanya.⁸

Bertolak dari pandangan tersebut, penulis tertarik untuk membahas pentingnya pendidikan multikultural Islam dalam konteks Indonesia yang majemuk dalam segi suku, agama, bahasa dan lain-lain.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur. Penelitian literatur metode penelitian dengan pengumpulan data/informasi dari berbagai sumber yang dapat digunakan terkait masalah yang akan diteliti. Menurut Burhan Bugin penelitian literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories. Sedangkan Sugiono mengemukakan bahwa Literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

³ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Cemerlang, 2003), 8.

⁴ Ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Sikap ini dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada, yaitu karena semua agama pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena persentuhan nilai satu sama lain, akan secara berangsur-angsur menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu pada satu titik pertemuan atau dalam terminologi al- Qur'an disebut *kalimah sawâ'*.

⁵ QS. Âli 'Imrân : 13.

⁶ QS. Al-Baqarah : 256.

⁷ Saihu et al., "Design of Islamic Education Based on Local Wisdom (An Analysis of Social Learning Theories in Forming Character through Ngejot Tradition in Bali)."

⁸ QS. Âli 'Imrân : 64.

Selanjutnya, jika dilihat dari kedekatan isi, literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, sumber primer (*primary source*) dan kedua sumber sekunder (*secondary source*). Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan Literatur semacam ini dapat berupa buku harian (*autobiography*), tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu sumber primer dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik sensus penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder (*secondary source*) adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literatur sekunder terdapat di ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbooks.

Dalam penelusuran beberapa literatur menggunakan mesin cari atau mungkin lebih mudahnya adalah pengindeks jenis apa saja dokumen. Misalnya kita gunakan *Google Scholar* dengan kueri mengandung anak kalimat Social Network, tentunya akan dihasilkan jumlah anak kalimat dengan daftar dokumen terkait. Penelitian dengan metode literatur masih sangat jarang digunakan. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan penelitian dengan metode literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Multikultural: Definisi dan Sejarah

Secara sederhana, Lash dan Featherstone mengartikan multikultural sebagai “keberagaman budaya”.⁹ Sejatinya, ada tiga konsep yang sering digunakan untuk mereferensikan keberagaman agama, ras, dan budaya dalam kehidupan masyarakat, yaitu: pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga konsep tersebut sebenarnya tidak mengekspresikan dimensi keberagaman yang sama, meskipun semuanya mengacu kepada adanya ‘ketidaktunggalan’.¹⁰ Pokok dari multikulturalisme adalah kesadaran untuk bersedia menerima orang lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa melihat perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Dengan demikian, cakupan makna yang terkandung dalam pluralitas adalah sekedar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), sementara multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di ruang publik.

Bikhu Parekh mengkategorisasikan diversitas dalam tiga hal. *Pertama*, perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. *Kedua*, perbedaan dalam perpektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau

⁹ Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), 2-6.

¹⁰ Konsep pluralitas mengandaikan adanya ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep sebelumnya, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural.

kelompok dengan perspektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*). Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk saja, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesetaraan derajat. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.¹¹

Multikulturalisme merupakan suatu kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai kenyataan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan ini akan terwujud seiring dengan adanya keterbukaan individu atau masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai sebuah kemestian yang tidak bisa diingkari ataupun ditolak, apalagi dimusnahkan. Persoalan yang seringkali dihadapi oleh masyarakat majemuk adalah konflik, yang dengan sendirinya bisa mengguncang tatanan sosial yang telah lama mengakar.¹² Sehingga, multikulturalisme sebenarnya merupakan hasil dialektika perjalanan panjang intelektual manusia setelah berjumpa dan bergelut dengan berbagai konflik. Multikulturalisme adalah posisi intelektual yang menyatakan keberpihakannya pada pemaknaan terhadap persamaan, keadilan, dan kebersamaan untuk memperkecil ruang konflik yang destruktif.¹³

Dengan demikian, multikulturalisme harus berbasis pada pandangan filsafat yang melihat konflik sebagai fenomena permanen yang lahir bersamaan dengan keanekaragaman dan perubahan yang dengan sendirinya selalu terbawa oleh kehidupan itu sendiri. Secara positif hal tersebut bisa dimaknai sebagai sesuatu yang positif untuk memperkaya spiritualitas dan memperkuat iman. Dengan demikian, multikulturalisme bisa diibaratkan seperti burung yang terbang ke angkasa, keluar dari batas-batas keberpihakan yang destruktif, melintasi batas-batas konflik untuk memberikan solusi alternatif yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Sebagai sebuah ide, Suparlan menyatakan multikulturalisme diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka.¹⁴ Lebih lanjut, James A. Banks gerakan hak-hak sipil tersebut, berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan

¹¹ Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam *Makalah* yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002,1.

¹² Saihu Saihu, "PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI JEMBRANA BALI)," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019, <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.364>.

¹³ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 32.

¹⁴ Suparlan, "Menuju Masyarakat, 2-3.

untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*).¹⁵

Multikulturalisme menjadi gagasan yang cukup kontekstual dengan realitas masyarakat kontemporer saat ini. Prinsip mendasar tentang kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan pengakuan terhadap perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan manusia di tengah himpitan budaya global. Pendidikan adalah sarana yang tepat untuk membangun kesadaran multikultural tersebut. Hal ini karena pendidikan multikultural berusaha mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan kemudian mensikapi dengan penuh toleran dan semangat egaliter.

2. Membumikan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Dalam dunia pendidikan ada dua istilah yang hampir sama bentuknya dan juga sering digunakan, yaitu *paedagogie* dan *paedagogiek*. *Paedagogie* berarti pendidikan, sedangkan *paedagogiek* artinya ilmu pendidikan. Istilah ini berasal dari kata *pedagogia* (Yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak.¹⁶ Selaras dengan pengertian semantik tersebut, Abuddin Nata menyatakan bahwa pendidikan secara umum adalah upaya mempengaruhi orang lain agar berubah pola pikir, ucapan, perbuatan, sifat dan wataknya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.¹⁸

Lebih lanjut, Doni Koesoema mendefinisikan bahwa pendidikan bukan hanya berurusan dengan penanaman nilai pada diri peserta didik semata, melainkan sebuah usaha bersama untuk menciptakan sebuah lingkungan pendidikan tempat setiap individu dapat menghayati kebebasannya sebagai sebuah prasarat bagi kehidupan moral yang dewasa.¹⁹ Ia juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, kata “pendidikan” secara terminologi memiliki beberapa pengertian di antaranya, dalam ensiklopedi pendidikan, pendidikan berarti suatu usaha manusia dewasa untuk

¹⁵ James A Banks (ed.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (London: Allyn and Bacon Press, 1989), 4-5.

¹⁶ Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pendidikan merupakan kata benda yang mendapat awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang berarti proses, perbuatan, cara mendidik. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 232; M. Djumransjah, *Filsafat Pendidikan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 21. Dalam bahasa Inggris, kata “pendidikan” diterjemahkan dengan “*education*” merupakan kata benda dari kata “*educate*” yang berarti mendidik. Lihat Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 207. Kata *ta’lim* dalam Kamus *Munjid* merupakan bentuk *masdar* dari ‘*alama*’ yang berarti pengajaran. Sementara itu kata *ta’dib* berasal dari kata *adaba* artinya mendidik dan melatih akhlaknya. Adapun kata *tarbiyah* yang memiliki akar kata *rabaya* berarti mendidik, mengasuh dan memelihara. Lihat Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 526, 512, dan 247.

¹⁷ Abuddin Nata, *Kapita Selektta Pendidikan Islam, Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), 164.

¹⁸ M. Djumransjah, *Filsafat Pendidikan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 22.

¹⁹ Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta, Drasindo, 2007), 4.

membawa anak yang belum dewasa ketingkat kedewasaan dalam arti sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatan secara moral.²⁰ Pengertian pendidikan yang jelas lagi didefinisikan oleh Azyumardi Azra. Menurut Azra, meskipun pendidikan didefinisikan secara berbeda oleh berbagai kalangan, namun pada dasarnya semua pandangan tersebut bertemu pada satu kesimpulan awal bahwa pendidikan merupakan proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien.²¹

Dalam konstitusi legalitas pendidikan nasional, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”²²

Konstitusi pendidikan sebelumnya, menjelaskan bahwa ada tiga tujuan pendidikan, yaitu pertama, menurut Undang-undang No.2 tahun 1985, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Kedua, dalam TAP MPR No. 11/MPR/1993 tujuan pendidikan lebih terperinci disebutkan bahwa pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional, serta sehat jasmani dan rohani. Ketiga, TAP MPR No. 4/MPR/1975 secara lebih terperinci dari point kedua menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membangun dibidang pendidikan yang didasarkan atas falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berpancasila sekaligus membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, menumbuhkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, serta mencintai bangsa dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945 bab II (Pasal 2,3 dan 4).²³

Pendidikan multikultural pada prinsipnya adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan suatu proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Akan tetapi tidak mudah untuk mendesain pendidikan multikultural secara praksis. Choirul Mahfud mengutip pendapat Muhaimin el Ma'hady menyatakan bahwa definisi pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara

²⁰ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidika*, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), 257.

²¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 3.

²² Lihat UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011.

²³ Nurla Isna Aunillah, *Paduan Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekola* (Jogjakarta: Laksana, 2011), 11-12.

keseluruhan (global).²⁴ HAR Tilaar menyatakan bahwa secara historis pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai Perang Dunia II.²⁵ Kemunculan gagasan tersebut selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial juga meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Pendidikan multikultural menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia. Secara horizontal, berbagai kelompok masyarakat yang kini dikategorikan sebagai “bangsa Indonesia” dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa, golongan penganut ajaran agama yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara vertikal, berbagai kelompok masyarakat itu bisa dibedakan atas *mode of production* yang bermuara pada perbedaan kelas sosial dan budaya.²⁶

Pendidikan multikultural diharapkan dapat menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi di masyarakat, atau paling tidak mampu memberikan penyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan. Selanjutnya pendidikan juga harus mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural. Faktor lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu institusi pendidikan.²⁷

Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua franca*), 13.000 pulau, dan 5 agama resmi.²⁸ Paling tidak keragaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan multikultural bisa dilihat dari rumusan Sonia Nieto²⁹ bahwa proses pendidikan yang komprehensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang bentuk

²⁴ Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 176.

²⁵ H. A. R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002).

²⁶ Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-teori Sosial Budaya* (Jakarta: Dirjen Depdikbud, 1994), 68.

²⁷ Banks (ed.), *Multicultural*, 14.

²⁸ Leo Suryadinata, et.al, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 30.

²⁹ Sonia Nieto, *Language, Culture and Teaching* (Mahwah New York: Lawrence Erlbaum, 2002), 29.

rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya) yang terefleksikan diantara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Menurutnya, pendidikan multikultural ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Karena jenis pendidikan ini merupakan pedagogi kritis, reflektif dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial. Hal yang senada, diungkapkan juga oleh Lawrence J. Saha, bahwa pendidikan multikultural adalah suatu proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat berlangsung dalam *setting* pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap.³⁰

Definisi yang berbeda diungkapkan oleh James A. Bank bahwa pendidikan multikultural terdiri dari tiga aspek, yaitu: konsep, gerakan, dan proses.³¹ *Pertama*, aspek konsep, pendidikan multikultural dipahami sebagai ide yang memandang semua peserta didik tanpa memperhatikan gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras mereka, dan atau karakteristik-karakteristik kultural lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. *Kedua*, aspek gerakan, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga aspek lain seperti metode, strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan sekolah. *Ketiga*, aspek proses, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa. Kesetaraan pendidikan, seperti kemerdekaan dan keadilan tidak mudah dicapai, karena itu proses ini harus berlangsung terus-menerus.

Dalam diskursus multikulturalisme dalam pendidikan sesuatu yang harus digarisbawahi adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu elemen dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang merepresentasikan satu kultur tertentu dalam masyarakat. Identitas pada dasarnya *inheren* dengan sikap pribadi ataupun kelompok masyarakat, karena dengan identitas tersebutlah, mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk pula dalam interaksi antar budaya yang berbeda. Dengan demikian, dalam pendidikan multikultur, identitas-identitas tersebut diasah melalui interaksi, baik internal budaya (*self critic*) maupun eksternal budaya. Oleh karena itu, identitas lokal atau budaya lokal merupakan muatan yang harus ada dalam pendidikan multikultur.

³⁰ Abdullah Aly, "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik" dalam *Makalah Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman*. (Surakarta: Fak. Ekonomi UMS, Tanggal 8 Januari 2005), 3.

³¹ Banks (ed.), *Multicultural*, 2-3.

Dalam masyarakat ditemukan pelbagai individu atau kelompok yang berasal dari budaya berbeda, demikian pula dalam pendidikan, diversitas tersebut tidak bisa dielakkan. Diversitas budaya itu bisa ditemukan di kalangan peserta didik maupun para guru yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam satu proses pendidikan. Diversitas itu juga bisa ditemukan melalui pengkayaan budaya-budaya lain yang ada dan berkembang dalam konstelasi budaya, lokal, nasional dan global. Oleh karena itu, pendidikan multikultur bukan merupakan satu bentuk pendidikan monokultur, akan tetapi model pendidikan yang berjalan di atas rel keragaman. Diversitas budaya ini akan mungkin tercapai dalam pendidikan jika pendidikan itu sendiri mengakui keragaman yang ada, bersikap terbuka (*openness*) dan memberi ruang kepada setiap perbedaan yang ada untuk terlibat dalam satu proses pendidikan.

Abdullah Aly berpendapat bahwa tujuan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran.³² Yang terkait dengan aspek sikap (*attitudinal goals*) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan mere-solusi konflik. Kemudian yang berkaitan dengan aspek pengetahuan (*cognitive goals*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesad-aran perspektif kultural. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran (*instructional goals*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik- teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai dan menjelaskan dinamika kultural.

Memperhatikan definisi dan tujuan pendidikan multikultural di atas, maka kurikulum pendidikan multikultural seharusnya berisi tentang materi-materi yang dapat menghadirkan lebih dari satu perspektif tentang suatu fenomena kultural. Untuk menghadirkan keragaman perspektif dalam kurikulum ini, menurut James A. Bank sebagaimana dikutip Zoran Minderovic dapat dilakukan dengan empat tahapan, yaitu: a) Tahap kontribusi (*contribution level*); b) Tahap penambahan (*additive level*), c) Tahap perubahan (*transformative level*), dan d) Tahap aksi sosial (*social action level*).³³

Bila pada tahap kontribusi, kurikulum memfokuskan pada kebudayaan minoritas tertentu, maka pada tahap penambahan, kurikulum memperkenalkan konsep dan tema-tema baru—misalnya, tema-tema yang terkait dengan multikulturalisme—dengan tanpa mengubah struktur kurikulum yang esensial. Selanjutnya, bila pada tahap perubahan, kurikulum memfasilitasi para siswa untuk melihat berbagai isu dan peristiwa dari perspektif budaya minoritas, maka pada tahap aksi sosial, kurikulum mengajak para siswa untuk memecahkan problem sosial yang disebabkan oleh persepsi budaya dalam satu dimensi.

³² Abdullah Aly, "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik", 349.

³³ Zoran Minderovic. Multicultural Education/Curriculum, dalam http://www.findarticle/cf_o/92602/0003/2602000388/p1/articles,jhtml?term=plurlism 2003, 2.

Kurikulum berbasis multikultural juga perlu memasukkan materi dan bahan ajar yang berorientasi pada penghargaan kepada orang lain. Dalam hubungan ini, James Lynch³⁴ merekomendasikan agar sekolah atau guru menyampaikan pokok-pokok bahasan multikultural, dengan berorientasi pada dua tujuan, yaitu: a) Penghargaan kepada orang lain (*respect for others*), dan b) Penghargaan kepada diri sendiri (*respect for self*). Kedua bentuk penghargaan ini, mencakup tiga ranah pembelajaran (*domain of learning*). Ketiga ranah pembelajaran tersebut adalah pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Rekomendasi Lynch di atas mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara dimensi intelektual dan emosional dalam perilaku siswa.

Sementara itu, H.A.R. Tilaar³⁵ menggariswahi bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu; *Pertama*, pendidikan multikultural haruslah berdismensi "*right to culture*" dan identitas lokal. *Kedua*, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanschauung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimalisasikan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. *Ketiga*, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. *Keempat*, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenophobia, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama. *Kelima*, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar individu, antar suku, antar agama dan beragam perbedaan yang ada. *Keenam*, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh seluruh komponen sosial-budaya yang plural.

3. Rekonstruksi *Blue Print* Pendidikan Agama Islam dalam Pendidikan Multikultural

Pada umumnya, pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial dan kekerasan semakin sulit diatasi, karena

³⁴ James Lynch, *Multicultural Education: Principles and Practice* (London: Routledge & Kegan Paul, 1986), 86-87.

³⁵ HAR Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2002), 185-190.

dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya.³⁶ Sebenarnya, akar timbulnya berbagai konflik sosial yang membuahkan anarki yang berkepanjangan, seringkali memang tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi dalam kenyataannya agama selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai konflik sosial tersebut.

Potensi konflik dan disintegrasi tersebut disebabkan karena agama dalam manifestasinya bersifat ambivalen terhadap persatuan dan kesatuan. Artinya, meskipun agama memiliki kekuatan pemersatu, agama juga mempunyai kekuatan pemecah belah. Ada beberapa alasan menurut Din Syamsuddin mengapa agama memiliki ambivalensi seperti itu, salah satunya adalah agama memiliki kecenderungan absolutistik yaitu kecenderungan untuk memutlakkan keyakinan keagamaannya sebagai kebenaran tunggal. Akibatnya, muncul rejeksionis yang merupakan penolakan terhadap kebenaran agama lain³⁷ yang dianggap berbeda dari dan berlawanan dengan yang lain. Akar konflik keagamaan, menurut Arthur D'Adamo adalah karena para pemeluk agama mengambil sikap untuk memandang agama dari sudut pandang agamanya sendiri.³⁸ Sehingga, yang lebih mencuat ke permukaan bukannya esensi kebenaran yang hendak ditawarkan oleh agama, melainkan semangat untuk menegasikan yang lain.

Disebabkan oleh *truth claim* itulah, maka setiap agama menyatakan ajarannya merupakan totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial sehingga secara kodrati cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya. Namun ketika agama-agama itu hadir secara historis, ia berhadapan dengan pluralisme keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, maka akan berimplikasi pada perilaku sosial. Dalam konteks inilah pandangan inklusif sangat diperlukan untuk menerima kenyataan hidup pluralism sebagai syarat mutlak bagi para penganut agama apapun.³⁹ Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan agama masih di- ajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya, seakan-akan hanya agamanya sendirilah yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun yang minoritas. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini, sudah barang tentu berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural, dan akan memperlemah persatuan bangsa. Karena itu, pendidikan agama Islam harus direvitalisasi dan direaktualisasi secara kreatif dan berwawasan multikultural sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya. Karena pada dasarnya masyarakat multikultural tidak hanya ciri khas masyarakat Indonesia. Dalam pengalaman paling

³⁶ Musa Asy'arie, *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/12465.htm>. 2004.

³⁷ M. Din Syamsuddin, "Mengelola Pluralitas Agama" dalam *Jawa Pos*, (12 Mei 1996), 4-5.

³⁸ Budhy Munawar Rachman, "pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), xxiv-xxvii.

³⁹ Terdapat pengertian pluralitas yang belum tentu disertai pluralisme. Pluralitas adalah semata-mata kenyataan majemuk, sedangkan pluralisme adalah faham yang menerima kenyataan majemuk itu sebagai sesuatu yang positif. Pluralisme juga tidak semata-mata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan akan tetapi yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Lihat Nurcholish Madjid, "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (konsepsi dan aktualisasi)" dalam *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya: PKSK, 1997), 71.

dini historisitas keberagaman Islam era kenabian Muhammad, masyarakat yang pluralistik secara religius telah terbentuk bahkan telah menjadi kesadaran umum pada saat itu. Kondisi demikian merupakan suatu kewajaran lantaran secara kronologis agama Islam memang muncul setelah beberapa agama yang telah ada sebelumnya.

Bukti empiris sejarah peradaban Islam di masa lalu, menunjukkan Islam tampil secara inklusif dan sangat menghargai non-muslim.⁴⁰ Sikap inklusif ini ada karena al-Qur'an mengajarkan paham *religius plurality*.⁴¹ Bagi orang Islam, dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini akan terdapat keragaman agama. Meskipun ada klaim bahwa kebenaran agama ada pada Islam,⁴² namun dalam al-Qur'an juga disebutkan adanya hak orang lain untuk beragama. Dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.⁴³ Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.

Inklusivisme Islam tersebut juga memberikan formulasi bahwa Islam adalah agama terbuka. Islam menolak eksklusivisme, absolutisme dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. Hal inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik dalam pendidikan agama Islam agar bisa melahirkan sikap inklusif sekaligus toleransi positif di kalangan umat beragama, sejalan dengan semangat al-Qur'an agar fenomena lahiriah tidak menghalangi usaha untuk menuju titik temu (*kalimat sawâ'*) antara semuanya.⁴⁴ Kalaupun rumusan linguistik dan verbal keyakinan keagamaan itu berbeda-beda dapat dipastikan bahwa eksternalisasi keimanan itu dalam dimensi kemanusiaan tentu sama.

Ajaran tauhid dalam Islam mengandung pengertian adanya suatu orde yang satu sekaligus menyeluruh. Dengan kata lain, terdapat hukum abadi yang universal. Menurut Marcel A. Boisard,⁴⁵ hukum yang abadi dan berlaku secara universal adalah berawal dari suatu keyakinan bahwa manusia adalah satu dan tercipta karena kehendak yang satu, yaitu Tuhan pencipta alam. Kesadaran demikian hanya bisa tumbuh pada manusia yang menyadari prinsip-prinsip moral yang dapat mempersatukan perasaan yang merupakan dasar kebajikan universal. Implikasi dari keyakinan bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu yaitu Tuhan, berarti manusia seluruhnya adalah makhluk Tuhan. Dengan demikian seluruh manusia adalah bersaudara karena sama-sama makhluk Tuhan. Adanya persamaan keyakinan sama-sama makhluk Tuhan dan rasa persaudaraan tersebut menurut Harun Nasution bisa menjadi landasan toleransi.⁴⁶ Adanya keyakinan itu mengasumsikan bahwa ciptaan-Nya juga pada hakikatnya adalah suatu kesatuan. Pandangan ini membawa

⁴⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), 102.

⁴¹ Ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Sikap ini dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada: yaitu karena semua agama pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena persentuhan nilai satu sama lain, akan secara berangsur-angsur menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu pada satu titik pertemuan atau dalam termonologi al-Qur'an disebut *kalimah sawâ'*.

⁴² QS. Âli Imrân : 13

⁴³ QS. al-Baqarah : 256.

⁴⁴ QS. Âli 'Imrân : 64.

⁴⁵ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 184.

⁴⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), 269.

pada kesimpulan bahwa seluruh jagad raya (*universe*) termasuk di dalamnya seluruh umat manusia apapun bangsa dan bahasanya adalah merupakan makhluk Tuhan juga, meskipun agama dan keyakinannya berbeda.

Seorang agamawan memang dituntut untuk mempunyai sikap yang "lebih" realistik ketika berhadapan dengan realitas empirik kehidupan masyarakat beragama yang pluralistik, terutama dalam memposisikan agama. Seperti dikemukakan oleh Hans Kung bahwa kedudukan agama harus dilihat dari dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam.⁴⁷ *Pertama*, dari luar, diakui adanya bermacam-macam agama yang benar. Inilah dimensi relatif suatu agama. Agama-agama ini mempunyai satu tujuan yaitu keselamatan (dengan konsep berbeda-beda) dengan jalan berbeda-beda. Lewat perbedaan ini, agama-agama bisa memperkaya satu sama lain. *Kedua*, dari dalam, diakui adanya satu agama yang benar, inilah dimensi mutlak suatu agama. Pendirian ini tidak harus menolak kebenaran agama-agama lain, walaupun benar pada tingkat-tingkat tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan pesan agama yang dianut. Melalui pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai etik yang fundamental yang dimiliki oleh peserta didik dapat menjadi benang merah yang dapat menghubungkan pengikut agama satu dengan lainnya sekaligus dapat menjadi *entri point* untuk mencari titik temu atau dalam terminologi al-Qur'an disebut *kalimat sawâ'*.

Bertolak dari pandangan ini, dimungkinkan bahwa Islam dapat menjadi pijakan bagi pendidikan multikultural tersebut. Konflik sosial yang mewarnai pasang surutnya persatuan Indonesia harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai oleh kemampuan manajemen politik bangsa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang memecah belah persatuan Indonesia. Salah satu cara strategis adalah pendidikan multikultural yang dilakukan secara aktual, cerdas, dan jujur.

D. KESIMPULAN

Pendidikan apapun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga, manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional. Karena itu untuk mengatasi problem kemanusiaan yang ada, tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan yang multidimensional. Dan, di dalamnya adalah pendidikan multikultural.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Mengingat kenyataan seperti ini, menjadi penting untuk mengembangkan pendidikan multikultural, yakni sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Dalam hal pendidikan multikultural, sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultur, sehingga menjadi

⁴⁷ ST. Sunardi, "Dialog: Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama" dalam Seri DIAN I *Dialog, Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan DIAN, 1994), 66-67.

Abd Aziz

bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultur para siswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Abdullah. "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik" dalam *Makalah Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman*. Surakarta: Fak. Ekonomi UMS, Tanggal 8 Januari 2005
- Asy'arie, Musa. *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*.
<http://www2.kompas.com/kompascetak/0409/03/opini/12465.htm>. 2004.
- Aunillah, Nurla Isna. *Paduan Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Jogjakarta: Laksana, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Banks, James A. (ed.). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. London: Allynand Bacon Press, 1989.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Djumransjah, M. *Filsafat Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Ihsan, Fuad. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Koesoema A, Doni. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta, Drasindo, 2007.
- Lash, Scott dan Mike Featherstone (ed.). *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*. London: Sage Publication, 2002.
- Lynch, James. *Multicultural Education: Principles and Practice*. London: Routledge & Kegan Paul, 1986.
- Madjid, Nurcholish. "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (konsep dan aktualisasi)" dalam *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: PKSK, 1997.
- _____. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Minderovic, Zoran. *Multicultural Education/Curriculum*, dalam <http://www.findarticle.com/0/92602/0003/2602000388/p1/article.jhtml?term=pluralism>. 2003.
- Mudyahardjo, Redja. *Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nata, Abuddin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam, Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2012.
- Nieto, Sonia. *Language, Culture and Teaching*. Mahwah NJ: Lawrence Earlbaum, 2002.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Depdikbud. 1994.
- Poerbakawatja, Soegarda. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Rachman, Budhy Munawar. "Pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad wahyuni Nafis. *Agama masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Saihu, Abd Aziz, Fatkhul Mubin, and Ahmad Zain Sarnoto. "Design of Islamic Education Based on Local Wisdom (An Analysis of Social Learning Theories in

- Forming Character through Ngejot Tradition in Bali)." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 06 SE-Articles (April 26, 2020): 1278–93. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/11802>.
- Saihu, Saihu. "PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURALISME." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2018): 170–87.
- . "PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI JEMBRANA BALI)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019. <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.364>.
- Sunardi, ST. "Dialog: Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama" dalam Seri DIAN I, *Dialog, Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan DIAN.I, 1994.
- Suparlan, Parsudi. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Denpasar Bali, 16-21 Juli. 2002.
- Suryadinata, Leo. et.al. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Syamsuddin, M. Din. "Mengelola Pluralitas Agama" dalam harian *Jawa Pos*. 12 Mei 1996.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2002
- . *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 1999.
- UU RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003. Jakarta: Cemerlang, 2003.